

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di dunia yang memiliki *trend* laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dilihat dari kawasan wilayah, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dari beberapa negara ASEAN+5 berada pada *trend* yang stabil dan mengalami peningkatan setiap tahun (World Bank, 2022).

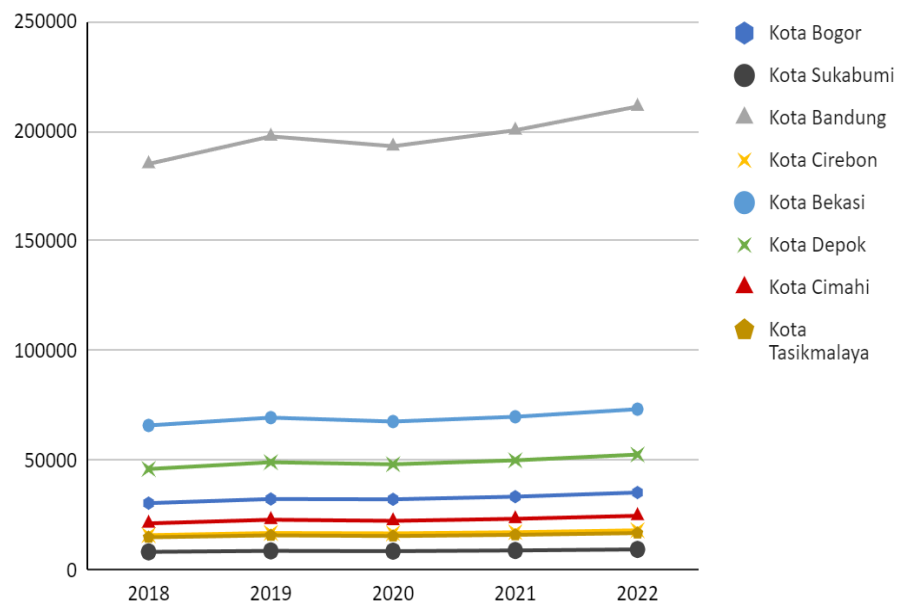
Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menganut asas desentralisasi, yaitu pembagian kekuasaan dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, hingga Desa dan turunannya (Pasal 1 ayat 1 UUD RI Tahun 1945). Hal ini membuat sistem kekuasaannya (otonom) dibagi menjadi dua, yaitu Pusat dan Daerah. Sistem Otonom baik Pusat dan Daerah saling berhubungan dua arah pada pelaksanaan otonomi di wilayah RI. Pada pelaksanaannya, Pusat memberikan kesempatan kepada Daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing sesuai kemampuan daerah tersebut dan tetap bertanggung jawab kepada Pusat (F. Amalia et al., 2022). Tidak hanya itu, Pusat juga bertanggung jawab untuk mengawasi, mengontrol dan memberikan bantuan serta kebijakan untuk mempercepat pembangunan nasional di wilayah RI (DPR RI).

Atas asas desentralisasi, Daerah memiliki hak otonom untuk melaksanakan program-program yang berkaitan untuk tujuan pembangunan

nasional NKRI, yaitu kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi adalah pengembangan dan perhatian dalam sasaran pertumbuhan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek. Pembangunan ekonomi juga diartikan sebagai perkembangan pendapatan per kapita dalam suatu masyarakat bersamaan dengan perombakan dan modernisasi dalam struktur ekonomi dari tradisional ke modern (Mulyani, 2017). Tidak hanya terdapat lebih banyak output, tetapi pembangunan ekonomi juga terjadi adanya perubahan-perubahan dalam kelembagaan dan pengetahuan teknik (terjadi modernisasi) dalam menghasilkan output yang lebih banyak tersebut. Disamping itu, dikatakan terjadi pembangunan ekonomi apabila pertambahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu melebihi dari tingkat pertambahan penduduk. Dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi, daerah perlu mengambil kebijakan untuk mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan sesuai dengan potensi atau sektor unggulan yang dimiliki daerah (Badrudin, 2012). Hal ini juga memberikan perhatian kepada sektor-sektor yang memiliki potensi untuk berkembang sehingga dapat mengambil kebijakan dan menganalisis perubahan struktur ekonomi (Mariana, 2010).

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Republik Indonesia yang memiliki sumber potensi yang melimpah. Daerah ini bertempat di Pulau Jawa oleh karena itu pembangunan daerah pada wilayah ini lebih optimal dibandingkan daerah lain. Pembangunan yang optimal ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar dari wilayah di Provinsi Jawa Barat baik

kota maupun kabupaten. Jawa Barat memiliki 17 Kabupaten dan 9 Kota. Sembilan (9) kota dalam wilayahnya yaitu Kota Bandung, Bekasi, Cimahi, Cirebon, Tasikmalaya, Sukabumi dan Banjar. Berikut ditampilkan Rata-rata Perkembangan PDRB sembilan (9) kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2022 (Gambar 1.1).



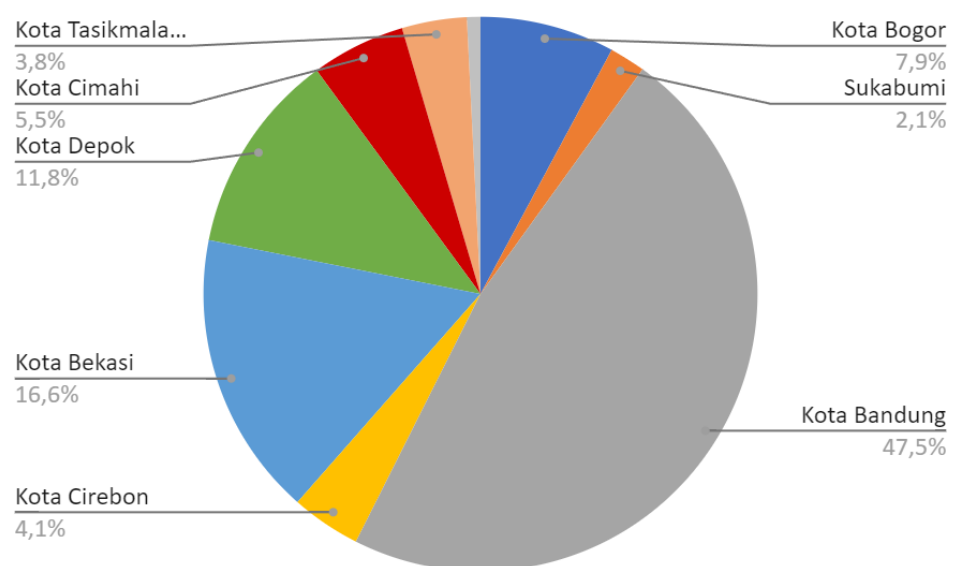
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (diolah kembali)

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan PDRB Kota di Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2018-2022 (Triliun).**

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan secara umum Rata-rata perkembangan PDRB kota di Provinsi Jawa Barat mengalami *trend up* (pertumbuhan). Hal ini berarti kota di Provinsi Jawa Barat telah mengalami peningkatan PDRB selama lima tahun terakhir. Walaupun demikian, perkembangan di wilayah kota Provinsi Jawa Barat juga menurun pada tahun 2020 dikarenakan terjadi Pandemi Covid-19. Dari sembilan (9) kota

di Provinsi Jawa Barat tersebut, PDRB yang paling tinggi berada di Kota Bandung yang mencapai Rp.185 - 211 Triliun dalam perkembangan PDRB lima tahun terakhir. Begitu juga sebaliknya, Kota Banjar memiliki perkembangan PDRB terendah di antara sembilan kota di Provinsi Jawa Barat sekitar Rp.3 - 3,5 Triliun. Dibalik itu, Kota Sukabumi menjadi kota terendah kedua yang memiliki perkembangan PDRB di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.8,2 - 9,3 Triliun.

Untuk melihat lebih jelas, dapat dilihat pada Gambar 1.2 bahwa Kota Sukabumi berada di peringkat kedua terendah yang memiliki rata-rata Kontribusi PDRB di wilayah kota Provinsi Jawa Barat selama lima tahun terakhir (2018-2022) sebesar 2,1%.

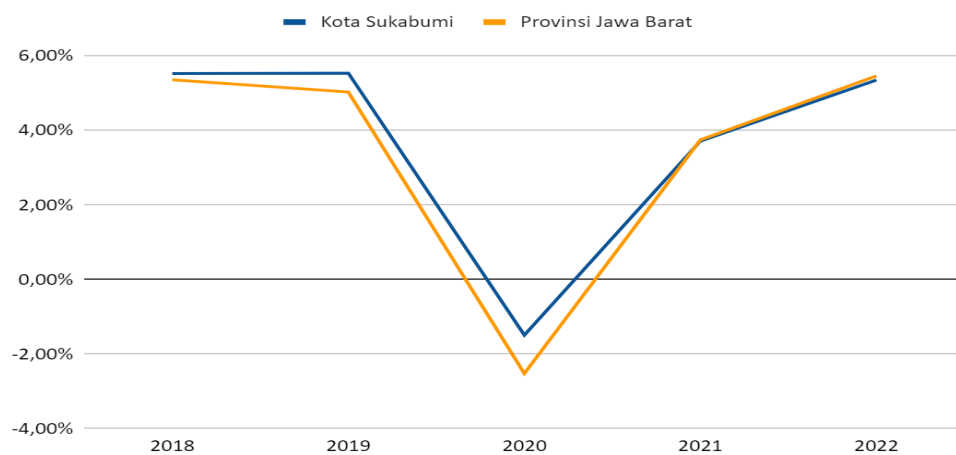


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (diolah kembali)

**Gambar 1.2**  
**Rata-rata Kontribusi di Wilayah Kota Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2018-2022 (Persen).**

Kontribusi yang rendah terjadi dikarenakan adanya kesenjangan atau ketimpangan dalam pembangunan daerah. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah untuk menghasilkan PDRB berbeda-beda (Chalid, 2015). Beberapa faktor lain yang mengakibatkan rendahnya PDRB di suatu daerah yaitu rendahnya potensi sumber daya alam, modal, teknologi dan kemampuan wilayah dalam pertumbuhan ekonomi (F. Amalia et al., 2022).

Untuk melihat kemampuan suatu wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur peningkatan wilayah setiap tahun. Berikut ditampilkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Sukabumi dengan perbandingan wilayah nasionalnya (Provinsi Jawa Barat) yang dapat dilihat pada Gambar 1.3 di bawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi (diolah kembali)

**Gambar 1.3**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi dan**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 (Persen)**

Berdasarkan Gambar 1.3, Kota Sukabumi memiliki Laju Pertumbuhan Ekonomi yang hampir serupa terhadap Provinsi Jawa Barat. Dilihat dari lima tahun terakhir, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi berada di atas wilayah perbandingannya (Provinsi Jawa Barat) dengan selisih rata-rata 0,31%. Hal ini berarti Kota Sukabumi mampu dalam mengatur pertumbuhan di wilayahnya sendiri. Pada tahun 2018-2020, baik Kota Sukabumi maupun Provinsi Jawa Barat mengalami rata-rata penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1,48% dan 2,85%, terutama pada tahun 2020 terjadi Masa Pandemi Covid-19. Hal ini mengakibatkan kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat turun drastis. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi yang turun ini juga masih lebih optimal dari Provinsi Jawa Barat. Walaupun demikian, tahun 2021-2022 Laju Pertumbuhan Ekonomi kedua wilayah tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,13% untuk Kota Sukabumi dan 4,23% untuk Provinsi Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan telah terjadinya kestabilan pada kedua daerah tersebut. Hingga pada tahun terakhir (2022), terjadi peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat sebesar 1,71%, sedangkan Kota Sukabumi mengalami penurunan sebesar 1,64% yang berbanding terbalik dengan kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Sukabumi Tahun 2022, Penurunan kinerja wilayah Kota Sukabumi ini dikarenakan ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan sebesar 0,046 poin dari tahun 2021 sebesar 0,436

sedangkan tahun 2022 sebesar 0,482 (Pemerintah Kota Sukabumi, 2022). Hal ini dapat disimpulkan bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi, baik Provinsi Jawa Barat maupun Kota Sukabumi sangat fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Kebijakan daerah yang bisa dioptimalkan bisa dilihat dari sumber daya dan kemampuan yang dimiliki suatu daerah. Sumber daya tersebut akan menampilkan sektor-sektor mana saja yang akan diprioritaskan (unggulan) sehingga dapat diekspor ke wilayah lain dan hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diharapkan memberikan pengaruh terhadap sektor-sektor lain (Soepono, 2001). Penentuan sektor unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat mempercepat tujuan pembangunan nasional. Tidak hanya itu, perlu dilakukan analisis perubahan struktur perekonomian dalam pembangunan tersebut untuk melihat peningkatan atau penurunan kinerja sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian nasional (Soepono, 1993).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, Kota Sukabumi merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi besar untuk ditingkatkan. Namun disisi lain, beberapa sektor dinilai kurang menguntungkan atau kontribusi relatif rendah terhadap PDRB. Sehingga Penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan yaitu menentukan sektor basis dan non basis, dan bagaimana kontribusi sektor unggulan terhadap perekonomian di Kota Sukabumi dengan judul penelitian “Analisis Sektor

Unggulan (LQ) dan Tipologi *Klassen* (wilayah maju dan tumbuh cepat) dalam Perekonomian Kota Sukabumi Tahun 2010-2022 “.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sektor apa yang menjadi sektor basis (unggulan) dan non basis dalam perekonomian Kota Sukabumi pada tahun 2010-2022?
2. Sektor apa saja yang termasuk dalam Kuadran I Tipologi *Klassen* (daerah maju dan tumbuh cepat) dalam perekonomian Kota Sukabumi pada tahun 2010-2022?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui sektor apa yang menjadi sektor basis (unggulan) dan non basis dalam perekonomian Kota Sukabumi pada tahun 2010-2022.
2. Untuk mengetahui sektor apa saja yang termasuk dalam Kuadran I Tipologi *Klassen* (daerah maju dan tumbuh cepat) dalam perekonomian Kota Sukabumi pada tahun 2010-2022.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu dan terapan ilmu:



1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Mampu menjadi tambahan ilmu pengetahuan, terutama pada bidang Ekonomi Regional dan Ekonomi Publik yang saling terkait, karena penelitian ini membahas tentang analisis mengenai sektor-sektor unggulan suatu wilayah yang dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang yang sama ataupun berbeda dan untuk penelitian selanjutnya

2. Aplikasi:

- A. Bagi Lembaga Pemerintah (Pemerintah Daerah)

Sebagai bahan acuan Pemerintah daerah dalam pemetaan pengembangan sektor-sektor ekonomi daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

- B. Bagi Masyarakat Kota Sukabumi

Sebagai bahan informasi dan referensi dalam mengkoreksi kinerja pemerintah dalam melaksanakan perekonomian dan untuk mengetahui perkembangan sektor-sektor ekonomi daerahnya.

- C. Bagi Pihak Swasta Lokal dan Asing serta Pengembang

Sebagai bahan informasi dalam penentuan kerja sama ekonomi Regional maupun Internasional di berbagai sektor ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan.

3. Bagi Penulis

Sebagai syarat penyelesaian Jurusan/Program Studi Ekonomi Pembangunan S1 dan menjadi tambahan pengetahuan serta

pengalaman khusus yang dapat diterapkan dalam menganalisis ekonomi suatu wilayah sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi dimasa yang akan datang.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi dengan memperoleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi.

### **1.5.2 Jadwal Penelitian**

Penelitian ini direncanakan lebih dari 6 bulan, dimulai dari September 2022 sampai April 2024. Adapun matriks jadwal penelitian ini yaitu sebagai berikut.

